

## PERKEMBANGAN PENERAPAN PRINSIP KONSERVATISME DALAM AKUNTANSI

Oleh

**Riri Zelmiyanti**

Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi UNISMA Bekasi

### Abstract

*This paper tried to see the development of the application of the principle of conservatism in accounting. In the previous study researchers directly see how the implementation of the application of the principle of conservatism. Whereas in this study tried to see the beginning of conservatism in accounting principles to the International Financial Report Standards (IFRS) or more towards the development of the principle of conservatism. This study also gives some examples of the implementation of the accounting standards. The existence of the financial statements of the international harmonization of accounting, affecting the implementation of the principle of conservatism in the company. The desire IFRS produce financial statements that could predict future circumstances contrary to the principle of conservatism, so the application of the principle of conservatism began to be reduced. But because of the level of uncertainty within the company led to the principle of conservatism can not be eliminated completely, so that the current IFRS issued a new principle, namely prudence.*

**Keywords:** Principle, conservatism, standards and financial statements.

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban manajemen perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan dapat menggambarkan kinerja manajemen perusahaan selama satu periode. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (2009) tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang berguna bagi pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan ekonomi. Pihak utama yang akan menggunakan laporan keuangan yaitu investor dan kreditor. Pihak-pihak tersebut menuntut laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dewan standar.

Salah satu prinsip yang mempengaruhi penilaian laporan keuangan yaitu konservatisme. Konservatisme adalah prinsip dalam menilai aktiva dan laba dengan kehati-hatian oleh karena aktivitas ekonomi dan bisnis dilingkupi suatu ketidakpastian. Penerapan konservatisme pada akuntansi biasanya terdapat dalam akun-akun tertentu seperti penilaian aset, kontrak jangka panjang, biaya pengembangan dan lain-lain. Penerapan prinsip konservatisme ini masih terjadi. Konservatisme akuntansi dianggap sebagai kendala yang akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Starling (1970) dalam Watts (2003) menyatakan konservatisme sampai saat ini masih memiliki peran penting dalam praktik akuntansi.

Penelitian mengenai prinsip konservatisme sangat penting, karena penerapan prinsip konservatisme akan mempengaruhi laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan. Beberapa peneliti sebelumnya telah mencoba meneliti mengenai prinsip konservatisme seperti Basu (2009) *conservatism research: historical development and future prospects*, Helman (2007) *accounting conservatism under IFRS* dan Khairina (2009) analisis eksistensi konservatisme akuntansi serta faktor-faktor yang mempengaruhi pada industri manufaktur di Indonesia.

Paper ini mencoba melihat perkembangan penerapan prinsip konservatisme dalam akuntansi. Pada penelitian sebelumnya peneliti langsung melihat bagaimana implementasi dari penerapan prinsip konservatisme, faktor yang mempengaruhi penerapan konservatisme dan pengembangan dari prinsip konservatisme tersebut. Sedangkan pada penelitian ini mencoba melihat awal prinsip konservatisme dalam akuntansi sampai adanya *International Financial Report Standar (IFRS)*. Penelitian ini juga memberikan beberapa contoh implementasi dalam standar akuntansi.

#### 1.2. Tujuan Artikel

Artikel ini bertujuan untuk melihat perkembangan konsep konservatisme yang dimulai dari sebelum dan setelah adanya *International Financial Report Standar (IFRS)*.

### PEMBAHASAN

#### 1.1 Konservatisme dalam Akuntansi

Suwardjono (2013) mendefinisikan konservatisme sebagai sikap atau aliran (*mazhab*) dalam menghadapi ketidakpastian, untuk menghasilkan suatu keputusan atas dasar munculnya hasil (*outcome*) yang terjelek dari ketidakpastian tersebut. Definisi konservatisme menurut Wolk dkk (2013) adalah usaha untuk memilih metode

akuntansi berterima umum yang menghasilkan: pengakuan pendapatan yang lambat, pengakuan beban lebih cepat, lebih rendah dalam penilaian aset dan lebih tinggi dalam penilaian kewajiban. Sedangkan Basu (1997) menyatakan konservatisme sebagai praktik mengurangi pendapatan (mengakui adanya penurunan aset bersih) sebagai jawaban berita buruk, tetapi tidak meningkatkan pendapatan (adanya peningkatan aset bersih) sebagai jawaban atas berita baik.

Dari beberapa pernyataan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa konservatisme merupakan salah satu prinsip kehati-hatian yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Prinsip kehati-hatian ini diterapkan ketika adanya kemungkinan rugi atau penurunan aset (peningkatan kewajiban) segera diungkapkan. Namun ketika kemungkinan terjadi laba atau peningkatan aset (penurunan kewajiban) perusahaan menunda untuk mengungkapkan. Dengan adanya penerapan prinsip konservatisme dalam perusahaan akan memiliki pengaruh terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh penyusun. Hal ini akan berpengaruh terhadap keputusan yang diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan.

Konservatisme merupakan prinsip yang kontroversial dalam praktik akuntansi. Di satu sisi, penerapan prinsip konservatisme akuntansi, menyatakan konservatisme bermanfaat untuk menghindari perilaku oportunistik manajer berkaitan dengan kontrak-kontrak yang bisa meminimalkan timbulnya *agency cost*. Menurut Fala (2007) dalam Hati (2011) penerapan prinsip konservatisme akan menghasilkan laba yang berkualitas karena prinsip konservatisme mencegah perusahaan membesar-besarkan angka laba selain itu bisa membantu pihak pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak *overstate*. Hal ini terjadi karena manajemen berusaha untuk memberikan angka laba yang sudah pasti dihasilkan perusahaan pada periode tersebut.

Di sisi lain pihak yang kontra, konservatisme akuntansi dianggap sebagai kendala yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Kiryanto dan Supriyanto (2006) dalam Hati (2011) menyatakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip konservatisme akan cenderung bias karena tidak bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena tidak adanya kesesuaian antara beban yang dikeluarkan dengan pendapatan yang akan diperoleh. Bahkan ketika perusahaan menerapkan prinsip konservatisme akan berdampak pada periode selanjutnya. Pada periode pertama biaya yang dikeluarkan perusahaan akan meningkat, sehingga laba menurun. Sedangkan pengakuan pendapatan terjadi pada periode kedua yang akan meningkatkan nilai laba. Oleh karena itu beberapa peneliti tidak setuju dengan penerapan prinsip konservatisme.

## 1.2 Awal penerapan konservatisme dalam akuntansi

Starling (1967) dalam Basu (2009) menyatakan konservatisme merupakan prinsip yang paling kuno dan memiliki pengaruh yang paling besar dalam akuntansi. Konservatisme direkomendasikan oleh auditor sejak abad ke 14 dan pada awal abad ke 15 diterapkan oleh pengusaha. Pendorf (1930) dalam Basu (1997) menyatakan bahwa pada abad ke 15 di Eropa Tengah telah menggunakan sistem pencatatan biaya historis dalam perdagangan antar persekutuan.

Penerapan biaya historis menunjukkan bahwa perusahaan telah menggunakan prinsip konservatisme. Ilustrasinya seperti inipengusaha membeli tanah pada tahun pertama seharga Rp 1.000,- ketika perusahaan menerapkan prinsip konservatisme pada tahun kedelapan nilai tanah tersebut masih Rp 1.000,-. Padahal jika dilihat di pasar nilai tanah tersebut kemungkinan ada peningkatan misal menjadi Rp 1.200,-. Tetapi karena perusahaan menerapkan prinsip konservatisme, nilai yang tercantum di neraca masih seharga nilai historis (harga pada saat perolehan tanah).

Pada awal abad ke 17 biaya rendah atau harga pasar (LCM) diinduksi dari contoh-contoh buku teks dan dikondifikasikan dalam hukum komersial, pernyataan tersebut diperkuat oleh akademik dan diskusi peradilan akuntansi yang menyatakan bahwa konservatisme sudah ada lebih dari satu abad (Basu, 2009). Penerapan prinsip konservatisme semakin menonjol ketika abad ke-20. Hal ini terjadi karena pada abad ke 19 dalam kasus tanah milik bangsawan di Inggris banyak pihak-pihak yang menyalahkan perusahaan dan auditor ketika terjadi kebangkrutan. Sehingga auditor menjadi terdakwa dalam beberapa kasus yang dilaporkan investor (Kam, 1990).

Hal tersebut mengakibatkan auditor menuntut perusahaan yang membuat laporan keuangan lebih hati-hati dalam menyusun laporan keuangan. Kehati-hatian ini dengan menerapkan prinsip konservatisme yang lebih menunda ketika terjadinya arus laba dan peningkatan aktiva. Para akuntan meyakini dengan menggunakan metode penilaian yang menghasilkan nilai aktiva bersih dan laba kecil, maka semakin kecil kemungkinan para pengguna laporan keuangan mengalami *mislead*.

## 1.3 Penerapan Prinsip konservatisme awal abad ke 20

Penerapan prinsip konservatisme tidak hanya pada sampai abad 17, bahkan pada abad ke-20 permintaan akan prinsip konservatisme akan semakin meningkat karena pemerintah mengeluarkan peraturan pengenaan pajak penghasilan (Basu (2009)). Beban pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan akan mengurangi laba perusahaan. Sehingga pihak manajemen berusaha untuk menghindari pajak. Oleh karena itu, manajemen akan berusaha untuk mengurangi beban yang dikeluarkannya dengan prinsip konservatisme.

Ada beberapa contoh standar yang mengatur penerapan prinsip konservatisme. Pertama FASB (*Financial Accounting Standards Board*) secara tidak langsung mendukung adanya prinsip konservatisme. Pada tahun 1980 FASB mengeluarkan *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) No 2. Walaupun dalam kerangka yang dijelaskan FASB pada SFAC No. 2 mengenai karakteristik kualitas informasi tidak tergambar. Secara tidak langsung FASB menyatakan adanya konservatisme/konvensi dalam akuntansi yang terdapat pada poin 91-97 dari standar tersebut. Konservatisme merupakan reaksi hati-hati dalam menghadapi ketidakpastian dalam perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mempertimbangkan risiko yang akan datang. Akuntan percaya bahwa konservatisme sesuai dalam membuat keputusan akuntansi. Pernyataan tersebut dikutip dari APB NO.4, aktiva dan kewajiban sering berada dalam ketidakpastian sehingga pengukuran dilakukan dengan metode historis agar tidak terjadi kelebihan aset bersih. Tindakan tersebut akan menyebabkan adanya penerapan prinsip konservatisme dalam perusahaan.

Pada pernyataan selanjutnya dijelaskan walaupun konservatisme cenderung bertentangan dengan karakteristik kualitatif pelaporan keuangan yang signifikan seperti, relevan dan *reliable* namun karena adanya ketidakpastian pada perusahaan, lebih baik pembuat laporan keuangan lebih berhati-hati dalam menyajikan laporan. Konservatisme merupakan reaksi bijaksana untuk ketidakpastian dalam mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko yang melekat pada situasi bisnis dapat dipertimbangkan dengan lebih matang. Ini merupakan salah satu cara terbaik perusahaan untuk menghindari kesalahan pelaporan pada investor.

Dari pernyataan FASB tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika sudah ada peraturan, perusahaan disarankan untuk menerapkan prinsip konservatisme. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesalahan informasi yang diberikan kepada pengguna laporan keuangan. Sehingga dengan menerapkan prinsip konservatisme nilai informasi yang diberikan terhadap investor/kreditor sesuai dengan kondisi keuangan yang ada saat ini.

Penerapan prinsip akuntansi konservatisme juga diterapkan di Indonesia. Indonesia memiliki sebuah lembaga Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang berdiri sejak 1957 sebagai wadah yang menanggapi perkembangan akuntansi. IAI ini melahirkan prinsip standar akuntansi keuangan (PSAK), yang menjadi pedoman perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Di dalam PSAK terdapat beberapa standar yang memperlihatkan adanya penerapan prinsip konservatisme diantaranya:

- a. PSAK No. 14 (1994) mengenai persediaan yang terkait dengan pemilihan perhitungan biaya persediaan, paragraf 38 menyatakan bahwa persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Pemilihan biaya terendah mengindikasikan perusahaan menggunakan prinsip konservatisme. Karena nilai persediaan yang dilaporkan di neraca merupakan nilai terendah bukan nilai sebenarnya disediakan oleh pasar.
- b. PSAK No. 16 (1994) mengenai aktiva tetap menyatakan bahwa dalam menilai aktiva tetap perusahaan menganut penilaian aktiva tetap berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Penilaian aktiva tetap berdasarkan harga perolehan juga mengindikasikan perusahaan menggunakan prinsip konservatisme, sebab penilaian tanah. Nilai tanah jarang mengalami penurunan, bahkan untuk beberapa tahun ke depan nilai tanah meningkat sedangkan laporan yang diberikan manajemen masih berdasarkan harga perolehan awal.
- c. PSAK No. 19 (2000) mengenai aktiva tidak berwujud, pada paragraf 36 perusahaan tidak boleh mengakui aktiva tidak berwujud yang timbul dari riset (atau dari tahapan riset pada suatu proyek intern). Pengeluaran untuk riset (atau tahap riset pada suatu proyek intern) diakui sebagai beban pada saat terjadi. Namun perusahaan belum bisa menunjukkan adanya penambahan aktiva sebelum proyek itu selesai. Oleh karena itu laporan beban dalam laporan laba rugi akan mengalami peningkatan, sedangkan untuk pendapatan baru diakui pada periode selanjutnya.
- d. PSAK No. 48 (1998) penurunan nilai aktiva, paragraf 41 pada PSAK menyatakan jika nilai diperoleh kembali dari suatu aktiva lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aktiva harus diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali. Penurunan tersebut merupakan rugi penurunan nilai aktiva dan harus segera diakui sebagai beban pada saat laporan laba rugi.
- e. PSAK 57 (revisi 2000): kewajiban diestimasi, kewajiban kontinjensi, dan aktiva. Dalam PSAK No. 57 ini kewajiban estimasi diakui tetapi tidak terdapat pengakuan aktiva diestimasi.

PSAK di atas memberikan gambaran bahwa adanya penerapan prinsip konservatisme di Indonesia. Perusahaan disarankan untuk menilai akun-akun aktiva yang ada di neraca dengan nilai yang lebih rendah, tetapi ketika adanya kewajiban atau beban manajemen diwajibkan untuk segera mengakui kejadian tersebut. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan akhir-akhir ini standar akuntansi internasional berusaha untuk melakukan harmonisasi dalam pelaporan akuntansi. Dengan pengaplikasian standar yang sama di seluruh dunia dapat membuat pelaporan keuangan yang seragam dan bisa dibandingkan. Oleh karena itu untuk melihat perkembangan terakhir dari penerapan prinsip konservatisme maka bisa dilihat dari *International Financial Reporting Standards* (IFRS).

#### 1.4 Konservatisme Pada Saat Adanya Standar Akuntansi Internasional

Dewasa ini pengaplikasian IFRS sedang hangat dibicarakan di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia, karena dengan pengaplikasian standar yang sama di seluruh dunia dapat menimbulkan keseragaman dalam

pelaporan keuangan. Selain itu, juga bisa digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan secara internasional. Zamzami (2011) menyatakan bahwa konvergensi IFRS adalah salah satu kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai anggota G20 forum.

Konservatisme akuntansi tidak menjadi prinsip yang diatur dalam IFRS karena konservatisme lebih menekankan keandalan informasi akuntansi dari masa lalu sedangkan IFRS lebih menekankan relevansi dari nilai informasi akuntansi untuk masa yang akan datang. Sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan ada wujud penolakan dan kritikan terhadap prinsip konservatisme akuntansi oleh IFRS. Prinsip *fair value* merupakan prinsip yang dianut oleh IFRS. Pada prinsip *fair value* lebih menekankan pada relevansi hal ini berseberangan dengan prinsip konservatisme yang menekankan pada reliabilitas.

Penerapan prinsip *fair value* bisa dilihat pada penilaian aset perusahaan, seperti penilaian tanah. Dalam membuat laporan keuangan berdasarkan prinsip *fair value* perusahaan dituntut kembali untuk menilai aset perusahaan sesuai dengan tanggal pelaporan. Jika dilihat dari penerapan konsep *fair value* akan memperlihatkan kekayaan perusahaan yang sebenarnya ada saat ini. Penerapan prinsip ini juga berlawanan dengan prinsip konservatisme yang menilai aset berdasarkan nilai historis.

Beberapa poin di bawah ini akan memberikan penjelasan yang lebih terperinci mengenai semakin berkurangnya penekanan atas penggunaan akuntansi konservatisme yang konsisten dalam IFRS.

- a. Dalam kerangka konseptual IFRS yang dipublikasi IASC (*International accounting standar Committee*) tahun 1989 dan diadopsi oleh IASB tahun 2001 penggunaan pelaporan keuangan dengan pendekatan laporan keuangan yang telah digunakan sejak lama dalam akuntansi konvensional digantikan dengan pendekatan neraca. Dalam pendekatan baru tersebut penekanan prinsip akuntansi yang digunakan penentuan, pengakuan, dan pengukuran nilai aset dengan tepat. Ketika perusahaan telah mengetahui nilai pasar dari aktiva dan hutang yang dimiliki perusahaan maka pengukuran nilai aktiva dan hutang tersebut berdasarkan nilai pasar. Pada tahun 2005 IFRS mengeluarkan peraturan baru yang diaplikasikan pada perusahaan-perusahaan *go public* di Swedia untuk memperbaharui pengukuran akun-akun dineraca berdasarkan nilai pasar setiap pelaporan kuartalan (Swaard, Rosencratz dan Narayan, 2005 dalam Khairana, 2009). Adanya tuntutan kesesuaian biaya dan pendapatan telah mengurangi penerapan praktik konservatisme. Pada praktik konservatisme pendapatan yang belum pasti belum boleh diakui sedangkan adanya kesesuaian menuntut perusahaan untuk melaporkan pendapatan pada periode yang sama dengan pengeluaran biaya.
- b. IAS 11 (*zero profit recognition for fixed price contracts*)  
Versi terbaru dari IAS 11 mulai berlaku sejak tahun 1995. Standar ini mengatur mengenai penggunaan metode POC (*percentage of completion*) untuk pengakuan atas pendapatan dan biaya dalam kontrak konstruksi sebagai pengganti metode CC (*Completed Contract*). Sebenarnya kedua metode ini menjelaskan mengenai kontrak jangka panjang. Metode CC dianggap lebih konservatisme karena pengakuan pendapatan kontrak dilakukan ketika perusahaan selesai melaksanakan pengerjaan suatu kontrak. Sehingga selama proses pelaksanaan kontrak tersebut perusahaan akan menanggung beban sedangkan pendapatannya masih nol. Namun pada metode POC pengakuan pendapatan dilakukan sesuai dengan estimasi presentase penyelesaian kontrak pada tanggal neraca. Perusahaan sudah boleh mengakui adanya pendapatan berdasarkan persentase penyelesaian kontrak. Adanya pengakuan pendapatan disini akan mengurangi penerapan dari prinsip konservatisme.
- c. IAS 12 (*Deferred Tax Asset*)  
Berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1998 mengatur mengenai pengakuan *deferred tax asset* pada neraca jika mungkin (*probable*) terdapat *future taxable profit*. Sebelum berlakunya IAS 12 tersebut *deferred tax asset* tidak diakui karena terdapat ketidakjelasan atas perolehan *deffered tax asset* dimasa yang akan datang. Sehingga dapat disimpulkan dengan adanya pengakuan pendapatan tersebut sudah mengurangi penerapan prinsip konservatisme.
- d. IAS 16 (*Property, Plant dan Equipment*)  
IAS 16 mengatur mengenai pengukuran nilai aktiva tetap perusahaan dapat memilih menggunakan metode biaya atau metode relevansi. Metode biaya merupakan metode yang sudah lama diterapkan namun pada metode relevansi mensyaratkan perusahaan untuk memperbaharui nilai aktiva secara periodik atas nilai pasarnya. Sehingga dengan adanya pembaharuan nilai aktiva tersebut prinsip konservatisme telah diturunkan. Ketika adanya peningkatan nilai aktiva seperti tanah perusahaan harus menyesuaikan dengan nilai pasar dan disana akan muncul peningkatan nilai pada aset perusahaan.
- e. IAS 38 (*Capitalisation of Development Cost*)  
IAS 38 pertama kali dikeluarkan pada tahun 1998 kemudian direvisi yang mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2004. Berdasarkan IAS 31 aktiva tidak berwujud yang berasal dari aktivitas pengembangan diakui sebagai aktiva jika telah memenuhi beberapa syarat tertentu. Sebelum berlakunya IAS 38 ini pembebanan langsung menjadi acuan utama dalam perlakuan akuntansi atas biaya pengembangan. Sehingga akan menimbulkan prinsip yang konservatisme ketika beban diakui terlebih dahulu. Namun pada saat ini untuk pengakuan biaya pengembangan akan dibagi kedalam beberapa tahap, karena biaya pengembangan ini tidak bisa langsung dimanfaatkan ketika adanya pengeluaran. Biaya pengembangan akan bisa dinikmati hasilnya

ketika perusahaan telah berhasil melakukan pengembangan tersebut. Untuk itu, biaya yang dikeluarkan perusahaan tidak lagi berlebihan, yang nantinya akan mengurangi penerapan prinsip konservatisme.

Dari peraturan di atas membuktikan bahwa IFRS telah berusaha untuk mengurangi penerapan prinsip konservatisme. Tujuan dari IFRS adalah membuat laporan keuangan mudah dimengerti, relevan, andal dan dapat dibandingkan, tetapi tanpa bias konservatisme. Selain itu standar IFRS juga menekankan penyajian informasi akuntansi ke arah prediksi.

Akhirnya IFRS membuat standar baru dengan prinsip *Fair value* agar kekayaan yang dilaporkan perusahaan saat ini sesuai dengan kenyataan yang ada pada perusahaan. Penerapan prinsip *fair value* telah mengurangi adanya pengakuan kewajiban dan beban yang lebih tinggi dalam laporan keuangan. Tetapi, karena adanya tingkat ketidakpastian dalam situasi perusahaan maka secara penuh prinsip konservatisme ini tidak bisa dihapuskan.

Di dalam IFRS prinsip konservatisme memang tidak ada namun IFRS mengganti dengan *prudence*. *Prudence* merupakan prinsip kehati-hatian dari perusahaan ketika adanya tingkat ketidakpastian. Hal ini diterapkan untuk mengantisipasi pengakuan laba yang berlebihan agar informasi yang diberikan oleh perusahaan bisa menggambarkan keadaan masa lalu, dan memprediksi keadaan ekonomi yang akan datang.

Di dalam IFRS konservatisme lebih diarahkan pada *prudence*. Di dalam kerangka IASB (*International Accounting Standards Boards*) paragraf 37 menyatakan *prudence* merupakan tingkat kehati-hatian dalam pelaksanaan penilaian yang dibutuhkan untuk membuat estimasi ketika adanya ketidakpastian, sehingga aset atau pendapatan tidak berlebihan dan kewajiban atau beban disajikan secara wajar.

Hal tersebut tidak lepas dari pro dan kontra dari pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan. Kehandalan dari informasi yang disajikan perusahaan sangat dibutuhkan oleh investor ataupun kreditor untuk mengambil keputusan. Namun adanya tingkat ketidakpastian yang membuat perusahaan tidak bisa secara penuh untuk menghilangkan prinsip konservatisme atau *prudence*.

### SIMPULAN

Konservatisme merupakan sebuah prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip konservatisme dalam perusahaan masih menjadi pro dan kontra. Pro dan kontra terjadi karena adanya manfaat dan kerugian dari penerapan prinsip ini. Selain itu banyaknya tuntutan dari pihak yang akan menggunakan laporan keuangan.

Penerapan prinsip konservatisme sudah banyak mengalami perkembangan. Prinsip konservatisme muncul karena adanya saran dari auditor untuk menerapkan prinsip konservatisme. Pada awalnya auditor dan perusahaan dituntut oleh pihak pengguna laporan keuangan karena terjadinya kerugian akibat terlalu optimisnya pihak manajemen dalam menilai aset perusahaan. Sehingga untuk mengurangi tuntutan tersebut auditor menyarankan penerapan prinsip konservatisme dalam perusahaan.

Perkembangan prinsip konservatisme terjadi pada abad ke-20, selain adanya saran auditor untuk menerapkan prinsip konservatisme, adanya tuntutan dari pemerintah dalam masalah pajak juga menjadi faktor meningkatnya penerapan prinsip konservatisme. Penerapan prinsip konservatisme bisa dilihat pada standar-standar yang dikeluarkan dewan standar. Implementasi prinsip konservatisme terdapat dalam PSAK 14, 16, 19, 48 dan 57.

Adanya usaha harmonisasi laporan keuangan dari internasional akuntansi, mempengaruhi penerapan prinsip konservatisme dalam perusahaan. Keinginan IFRS menghasilkan laporan keuangan yang bisa memprediksi keadaan masa depan bertentangan dengan prinsip konservatisme, sehingga penerapan prinsip konservatisme mulai dikurangi. Tetapi karena adanya tingkat ketidakpastian dalam perusahaan menyebabkan prinsip konservatisme tidak bisa dihilangkan secara penuh, sehingga saat ini IFRS mengeluarkan prinsip baru yaitu *prudence*.

### DAFTAR PUSTAKA

- Basu, Sudipta. 1997. The Conservatism Principle and The Asymmetric Timeliness of Earnings. *Journal Of Accounting & Economics* 24 (Desember):3-37.
- Basu, Sudipta. 2009. "Conservatism Research: Historical Development and Future Prospects. Fox School of Business, Temple University USA.
- Hati, Lia Alfian Dinanar. 2011. "Telaah Literatur Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konservatisme Akuntansi," *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Volume 8 Nomor 2, November 2011.
- Hellman, Niclas. 2007. *Accounting Conservatism Under IFRS*. Stockholm School of Economics, Department of Accounting and Managerial Finance, Sweden.
- Ikatan Akuntan Indonesia (1994), *Standar Akuntansi Keuangan*, Buku Satu, Salemba Empat, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. *Standar Akuntansi Keuangan*, Per Juni 2012. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- International Accounting Standards Board (2006) *International Financial Reporting Standards 2006 Bound Volume*. London: International Accounting Standards Committee Foundation.
- Kam, Vernon. 1990. *Accounting Theory Second Edition*. Printed In Singapore

- Khairina, Najwa. 2009. Analisis Eksistensi Konservatisme Akuntansi Serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pada Industry Manufaktur Di Indonesia. *Skripsi*. FE Universitas Indonesia, Jakarta.
- McGregor, W. and Street, D. L. (2007) IASB and FASB face challenges in pursuit of joint conceptual framework, *Journal of International Financial Management and Accounting*, 18(1), pp. 39-51.
- Suwardjono. 2013. *Teori Akuntansi Perikayasaan dan Pelaporan Keuangan*. BPFE-Yogyakarta.
- Watts, R.L. 2003. Conservatism in Accounting Part I: Explanations and Implications. *Journal of Accounting and Economics*.
- Wolk, H. I., Dodd, J. L., and Rozycki, J. J. 2013. *Accounting Theory: Conceptual Issues in a Political and Economic Environment*. 7<sup>th</sup> Ed. Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc
- Zamzami, Faiz. 2011. *Perkembangan Konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS) di Indonesia*. Yogyakarta: disadur dari: <http://faizzamzami.wordpress.com> pada 6 Juni 2013.